

BAB IV

KESIMPULAN

Israel sejak dahulu memang terkenal memiliki hubungan yang konfliktnya dengan negara-negara Arab, hubungan yang konfliktnya ini pada awalnya hanya berisikan perang atau pertentangan. Salah satu negara Arab yang sering berkonflik dengan Israel adalah Yordania.

Hubungan Yordania dengan Israel terkesan tidak harmonis, hal ini dapat dilihat dari berbagai perang yang melibatkan keduanya. Yang pertama pada Perang Arab I tahun 1948 yang melibatkan Yordania, Irak, Lebanon, Suriah dan Mesir. Dan yang kedua pada Perang Arab II tahun 1967 melibatkan Yordania, Suriah dan Mesir melawan Israel. Kedua perang ini pun dimenangkan oleh Israel dan Israel berhasil mencaplok sebagian besar dari area Yerusalem.

Latar belakang sejarah yang penuh dengan konflik ini ternyata tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama diantara kedua negara. Dimana pada tahun 1994, Yordania diwakili Raja Hussein bersepakat dengan Israel yang diwakili oleh Perdana Menteri Netanyahu untuk menandatangani sebuah Perjanjian Damai. Perjanjian ini pun di dukung dan dimediasi oleh Amerika Serikat yaitu Presiden Bill Clinton selaku sekutu Israel.

Perjanjian tersebut berisikan diantaranya penyelesaian sengketa air dan tanah pengakuan Israel terhadap peran Yordania dalam melindungi tempat-tempat suci di area Yerusalem dan kesepakatan Israel mengakui Negara Palestina di beberapa wilayah di tepi Barat Sungai Yordania.

Dengan penandatanganan perjanjian ini, telah membuka kerja sama antara Israel dan Yordania di banyak bidang seperti Keamanan, Perdagangan dan Industry, Lingkungan dan sebagainya.

Perjanjian damai tahun 1994 adalah salah satu bentuk kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Yordania dalam aktivitas internasionalnya. Perjanjian tersebut menjadi awal dari hubungan diplomatik yang terjalin dengan Israel. Berbagai tindakan luar negeri tentunya dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti aktor lain ataupun fenomena internasional yang sedang terjadi.

Dalam Kebijakan Luar Negeri Yordania, terdapat tiga gagasan utama. Yang pertama, adalah Rekonsiliasi Ekonomi. Dimana pasca kekalahan perang teluk, Yordania mengalami banyak sekali kerugian perang mengakibatkan negaranya mengalami krisis ekonomi yang berat ditambah dengan konflik regional yang sering sekali terjadi dan berdampak besar pada Yordania. Oleh karena itu Yordania berusaha melakukan kerjasama juga menarik berbagai investor untuk masuk ke negaranya guna mengatasi permasalahan tersebut.

Yang kedua adalah Demokrasi HAM dimana merupakan salah satu tren demokrasi yang berasal dari Amerika Serikat. Paham tersebut menjadi kebijakan luar negeri Yordania untuk menyebarkan di kawasan regional, kebijakan ini dilakukan karena Yordania menunjukkan kepihakkannya terhadap barat, pada Khususnya adalah Amerika Serikat sebagai sekutunya.

Dan yang ketiga, adalah perdamaian Israel-Palestina. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan kedua negara berkonflik tersebut. Tentu akan berdampak besar pada keamanan Yordania. Oleh karena itu penting untuk ikut andil dalam penyelesaian masalah keduanya. Apalagi ditambah dengan peran Yordania sebagai penjaga situs suci di Yerusalem yang notabenehnya merupakan daerah konflik.

Bagi Yordania terdapat beberapa alasan yang mendorongnya melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Pasca Perang Teluk, Yordania kehilangan banyak negara investornya seperti negara-negara Arab dan Teluk. Oleh karena itu diperlukan alternatif lain untuk mendapatkan suntikan dana. Pasca perjanjian damai yang didukung oleh AS, memberikan banyak keuntungan secara finansial pada yordania pada saat itu, dimana AS yang mengurangi utang Yordania serta memberikan sumbangan dana secara teratur. Secara tidak langsung, menjalin hubungan dengan Israel juga membukakan alternatif sumber baru untuk suntikan dana Yordania.

Selain itu ditengah kawasan yang dipenuhi banyak konflik regional, Yordania beranggapan bahwa tidak ada salahnya menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dapat mengurangi satu lawannya dikawasan, bahkan mendapatkan keuntungan finansial.

Kerjasama pun mulai terjalin diawali pada tahun 1996 yaitu dengan program Qualification Industrial Zone yang merupakan

program pasar bebas untuk akses keluar masuk barang dagang antara Yordania-Israel-AS. Sejak itu kerjasama antar kedua semakin meluas diberbagai bidang seperti infrastruktur, pertanian, pendidikan, lingkungan dan sebagainya. Hingga pada 2018, dua dekade pasca penandatngana perjanjian, Yordania melalui Raja Abdullah II mengumumkan rencananya yaitu tidak melanjutkan lagi Perjanjian Damai dengan Israel yang sudah terjalin hingga dua dekade lebih.

Sesuai dengan teori Coplin tentang Foreign Decision Making Process terdapat 3 faktor saling berhubungan yang mempengaruhi Yordania melakukan pemutusan perjanjian tersebut. Diantaranya adalah alasan konteks internasional, kapabilitas militer dan ekonomi, serta politik domestik.

Yang pertama adalah Isu yang terjadi di Yerusalem. Yerusalem yang saat ini berstatus quo terdapat berbagai peninggalan situs-situs suci bagi umat Islam dan Yahudi yang menjadi salah satu alasan konflik Israel Palestina. Pernyataan Perdana Menteri Israel Netanyahu yang berencana melakukan pencaplokan kepada keseluruhan Yerusalem ditambah dengan pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel menuai banyak protes dari dunia Internasional. Israel dianggap telah melanggar hukum Internasional dan juga tidak menghargai peran Yordania di wilayah tersebut sesuai dengan isi perjanjian tahun 1994.

Perencanaan AS tentang kepemilikan penuh Yerusalem oleh Israel ini menyebabkan banyak negara berlomba-lomba memperluas pengaruhnya di Yerusalem guna mendapatkan hak istimewa tersebut, seperti Arab Saudi, Turki dan Maroko.

Adanya kompetisi dengan negara-negara yang cenderung dominan di kawasan timur tengah ini akan menjadi ancaman bagi status Yordania sebagai penjaga di Yerusalem, dimana peran ini juga menjadi salah satu agenda politik domestik dan juga untuk memperkokoh posisi Yordania di kawasan. Oleh karena itu, Yordania harus mencoba menentang keputusan Israel ini dan salah satu senjatanya adalah dengan memutuskan perjanjian damai.

Alasan kedua yang menyebabkan pemutusan perjanjian tersebut adalah masalah keamanan dan juga ekonomi. Semenjak perjanjian damai, hubungan antara Yordania dan Israel tidak selalu harmonis. Banyak sekali kekerasan yang terjadi di perbatasan dan

juga di Yerusalem. Hal ini menyebabkan hubungan diplomatik keduanya yang harus mengalami ketegangan berulang kali.

Keinginan Israel mencaplok seluruh Yerusalem dan Lembah Yordania juga memunculkan kekhawatiran Yordania akan adanya ledakan pengungsi dari Yordania. Sedangkan pengungsi Palestina di Yordania saat ini telah mencapai 2 juta lebih jiwa. Masalah pengungsi ini akan menyebabkan banyak gangguan terhadap stabilitas dalam negeri baik sosial, keamanan maupun ekonomi. Dengan banyaknya pengungsi yang masuk, otomatis akan meningkatkan kebutuhan baik makanan, kesehatan maupun pendidikan di dalam negeri. Sedangkan Yordania yang masih dilanda krisis ekonomi dan berkurangnya suntikan dana dari UN akan sulit untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut.

Ditambah dengan kerjasama dengan Israel selama beberapa dekade ini tidak membawa perubahan signifikan terhadap perekonomian Yordania. Oleh karena itu melihat permasalahan ekonomi di Yordania yang tidak kunjung membaik dan berbagai masalah regional, Perjanjian damai terkesan tidak membawa banyak keuntungan bagi Yordania. Hal ini pun mendorong Yordania untuk membatalkan perjanjian damai dengan Israel.

Yang terakhir adalah politik domestik. Banyaknya warga Yordania keturunan Palestina membuat Yordania memiliki keterikatan yang kuat terhadap konflik Israel-Palestina. Ditambah dengan warga dan para politisi yang mayoritas memberikan dukungannya terhadap Palestina.

Tuntutan pemutusan yang pertama berasal dari Parlemen Yordania. Dimana Parlemen mendesak Raja Abdullah II untuk membatalkan perjanjian damai dengan Israel melihat banyak sekali pelanggaran yang telah dilakukan oleh Israel sejak perjanjian damai tahun 1994. Tekanan dari masyarakat Yordania bisa dilihat pada tahun 2014 dimana ribuan warga turun ke jalan menuntut pemerintah membatalkan perjanjian damai dengan Israel pasca kekerasan yang terjadi di Yerusalem. Sedangkan pada 2017 warga juga kembali melakukan aksi protes.

Selain karena masalah di Yerusalem yang semakin berbahaya, aksi protes yang dilakukan ini juga dapat berdampak kepada pemerintah itu sendiri, yaitu posisi Raja Abdullah II ditengah tren

aran spring yang sedang melanda timur tengah. Raja Abdulla II harus berusaha mengambil kembali kepercayaan rakyatnya yaitu dengan mendengarkan tuntutan mereka. Oleh karena itu, Raja Abdullah II mengambil tindakan dengan memutuskan perjanjian damai tahun 1994 dengan Israel.

Dari berbagai alasan diatas dapat dilihat berbagai pelanggaran dari pasal-pasal perjanjian yang dilakukan oleh Israel. Diantaranya tidak menghormati peran Yordania dan tidak menghargai status quo dari area Yerusalem dengan melakukan berbagai tindakan militer yang menghambat akses masyarakat pada Area tersebut. Melanggar perjanjian mengenai perbatasan dengan melakukan pencaplokan yang tidak sesuai dengan batas wilayah yang telah diatur oleh PBB. Selain itu kerjasama yang dilakukan keduanya sesuai perjanjian damai tidak berjalan secara maksimal hingga saat ini.

Berbagai pelanggaran yang dilakukan Israel menyebabkan berbagai kerugian yang dialami oleh Yordania seperti yang telah disebutkan diatas. Sedangkan ekspektasi awal Yordania untuk emnjalin kerjasama dengan Israel adalah mengurangi ancaman dari negara tersebut dan meningkatkan manfaat baik ekonomi maupun keamanan disekitar wilayahnya. Hal inilah yang membuat Yordania akhirnya mengambil tindakan untuk menghentikan perjanjian damai dengan melihat tindakan Israel yang tidak beritikad baik mengikuti peraturan-peraturan sesuai isi perjanjian tersebut.